

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Problematika pengelolaan sampah tetap menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024, timbulan sampah nasional mencapai sekitar 34,21 juta ton, dengan 19,64% di antaranya merupakan sampah plastik. Dari total timbulan tersebut, sekitar 59,74–64,3% telah terkelola, sementara 35,7–40,26% sisanya masih belum dikelola dengan baik (SIPSN KLHK, 2024)

Problematika pengelolaan sampah terus menjadi isu krusial yang dihadapi Indonesia dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2024 timbulan sampah nasional tercatat mencapai sekitar 33,79 juta ton, di mana sekitar 19,64 persen merupakan sampah plastik. Dari total timbulan tersebut, hanya 59,74 hingga 64,3 persen sampah yang telah berhasil terkelola, sedangkan sisanya, yakni 35,7 hingga 40,26 persen, masih belum tertangani dengan baik (SIPSN KLHK, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan sampah di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius dan upaya yang lebih.

Kompleksitas permasalahan pengelolaan sampah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang menghasilkan jenis sampah yang semakin beragam dan jumlah yang lebih besar.

Berdasarkan temuan terbaru dari Kemenko PMK pada tahun 2024, masih terdapat sebagian besar desa dan kelurahan di Indonesia yang belum memiliki fasilitas pembuangan sampah rumah tangga yang memadai. Akibatnya, sekitar 70,5 persen masyarakat masih membuang sampah dengan cara dibakar atau membuang ke dalam lubang/tanah. Praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serius, termasuk degradasi kualitas udara, kontaminasi sumber air tanah, serta meningkatkan risiko masalah kesehatan masyarakat secara signifikan.

Dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah yang tidak tepat sangatlah multidimensional. Berbagai senyawa kimia beracun yang berasal dari plastik dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara, makanan, dan minuman yang terkontaminasi limbah plastik. Limbah plastik dapat menghasilkan zat karsinogenik yang dapat memicu kanker, seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker prostat, dan kanker testis. Dimensi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik mencakup kontaminasi air, tanah, dan udara yang mengancam keberlangsungan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang kompleks. Data menunjukkan bahwa sumber utama sampah Jawa Barat dihasilkan dari rumah tangga dengan kontribusi sebesar 63,53% dari total sampah, diikuti sampah pasar sebesar 14,88% (GoodStats, 2025). Volume timbulan sampah di Jawa Barat mencapai 4,89 juta ton pada 2022, menempatkannya sebagai provinsi ketiga terbesar penghasil sampah di Indonesia. Kasus overload TPA Sarimukti di Bandung

Barat menjadi ilustrasi konkret tentang krisis pengelolaan sampah di Jawa Barat, dimana kondisi TPA tersebut sudah overload 1.000% (Detik Jabar, 2024).

Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan timbulan sampah mencapai 574,68 ton per hari menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Kondisi geografis, tingkat kepadatan penduduk, dan aktivitas ekonomi masyarakat berkontribusi terhadap kompleksitas permasalahan sampah di wilayah ini. Karakteristik sosio-demografis Kabupaten Ciamis yang didominasi oleh masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang beragam menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Perbedaan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah memerlukan pendekatan yang adaptif dan partisipatif.

Merespons urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayahnya. Penetapan peraturan daerah ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan sebagaimana termuat dalam konsideran yang menyatakan: "bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan mengamanatkan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah" (Perda Kabupaten Ciamis No. 2 Tahun 2018).

Lebih lanjut, konsideran huruf b menegaskan bahwa: "dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan dan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan

efisien agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat" (Perda Kabupaten Ciamis No. 2 Tahun 2018).

Peraturan daerah ini mengatur ruang lingkup pengelolaan sampah yang meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Dalam aspek asas dan tujuan, Pasal 3 menetapkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Sementara Pasal 4 menegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dimensi kelembagaan dalam peraturan ini diatur melalui pembagian tugas dan wewenang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana termuat dalam Pasal 5 yang menyatakan: "SKPD yang mengelola bidang persampahan dan kebersihan bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan." Aspek penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pengurangan sampah, dan penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 telah disusun secara komprehensif dengan mengakomodasi berbagai aspek pengelolaan sampah, namun keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Studi implementasi kebijakan publik menunjukkan

bahwa kesenjangan antara formulasi kebijakan dan pencapaian hasil sering terjadi akibat berbagai faktor implementasi yang tidak optimal (Subarsono, 2016).

Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan sampah, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan kajian mendalam, antara lain: pertama, kapasitas kelembagaan SKPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; kedua, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pendukung; ketiga, koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan sampah; keempat, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam implementasi kebijakan; dan kelima, efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Urgensi penelitian ini menjadi dasar utama diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini hadir sebagai respons atau tuntutan Pasal 44 ayat (1) Permendagri No.33 Tahun 2010, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan daerah pengelolaan sampah. Namun, keberadaan aturan hukum saja belum cukup dengan tantangan sebenarnya terletak pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan secara efektif dan berkelanjutan.

Fokus penelitian ini beralih dari sekedar menjelaskan pentingnya kebijakan ke pengujian bagaimana Perda No.2 Tahun 2018 diterapkan untuk menyelesaikan masalah publik ini. Studi implementasi kebijakan menjadi penting untuk memahami sejauh mana undang-undang dapat mengatasi tantangan institusional, mendorong kerja sama multipihak dan mengubah perilaku masyarakat seperti yang diharapkan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan dinamika, inovasi, dan tantangan nyata yang dihadapi dalam proses pelaksanaan

kebijakan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama: pertama, menganalisis urgensi penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah; dan kedua, mengkaji implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik. Kedua fokus penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apa urgensi ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Untuk menganalisis urgensi ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik dan studi kebijakan publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan lingkungan hidup. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah literatur tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat pemerintahan daerah, serta memberikan perspektif empiris terhadap teori-teori implementasi kebijakan publik yang telah ada.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan model implementasi kebijakan yang lebih kontekstual dengan kondisi pemerintahan daerah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis.

Bagi pemerintah daerah lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan referensi dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. Temuan penelitian dapat memberikan insight tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Bagi stakeholder pengelola sampah, termasuk lembaga pengelola sampah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan regulasi dan kebijakan pengelolaan sampah nasional, serta strategi pembinaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah.